

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota provinsi sumatera barat tahun anggaran 2014-2016. *Akuntansi dan Manajemen*, 14(1), 1-14.
- Anggara, E., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2162-2184.
- Anton, F. X. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika Vol. 1*(2).
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPK-RI. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018*.
- BPK-RI. 2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019*.
- BPK-RI. 2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020*.
- BPK-RI. 2022. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021*.
- BPK-RI. 2023. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022*.
- Difinubun, Y., & Fatimah, U. F. N. (2023). Financial Statement Disclosure: Satu Tinjauan Keuangan Daerah. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 3(1), 55-63.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. *Australian Journal of Management*, 16, 49–6

- Fajarudin. 2021. "Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah." *In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* 1(1):662–71.
- Fasa, R. F. D., Masnila, N., & Hartaty, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Se-Sumatera. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(8), 1014-1028.
- Febriani, U., & Harahap, J. P. J. (2021). Analisis Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Regress: Journal of Economics & Management*, 1(1), 9-17.
- Feriyanti, M., Hermanto, H., & Suransi, N. K. (2015). Determinan kepatuhan pada ketentuan pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat). *InFestasi*, 11(2), 171-185.
- Finakesti, L., Yulina, B., & Hartaty, S. (2022). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(1), 71-80.
- Fuadi, M. Z., & Asmara, J. A. (2020). Penerimaan Dari Pemerintah Pusat, Ukuran Legislatif, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh*) (Doctoral dissertation, Syiah Kuala University).
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. USP-AMP YKPN.
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 22(1).
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 20, 1-26.

- Hiola, Y., & Harun, E. (2021). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Gorontalo. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 89-101.
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 864-874.
- Kogoya, S., Salle, A., & Wijaya, A. H. C. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD di pemerintah kabupaten-kota di provinsi Papua. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(2), 98-111.
- Kurniawati, D., Sarwono, A. E., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Dan Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2018). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3), 237-248.
- Nadeak, Ruslina. 2003. Analisis Rasio Keuangan pada APBD Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Ningsih, R. F. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah via website (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2015). *Jurnal Akuntansi*, 6(2).
- Oktarida, A., Fithri, E. J., Riama, L. V., & Hartaty, S. (2020, April). Determinants of the Quality Regional Financial Statement. *In 3rd Forum in Research, Science, and Technology (FIRST 2019) (pp. 153-158)*. Atlantis Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2010. Jakarta.
- Putra, D. A., Arifin, K. Z., & Indriasari, D. (2023). Analisis Faktor-Faktor Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. *EKSISTANSI*, 12(2).
- Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2016). Pengaruh temuan, tingkat penyimpangan, opini audit, dan karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat

pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. *Info Artha*, 1, 97-110.

Raharjo, E. (2007). Teori agensi dan teori *stewardship* dalam perspektif akuntansi. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1).

Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 4.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. ALFABETA

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. ALFABETA

Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *JURNAL AKUNTANSI DAN AUDITING*, 8(1), 30-42.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara*. 2003. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010. *Keterbukaan Informasi Publik*. 2008. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.